

**BAB IV**  
**STRATEGI POLITIK IKHWANUL MUSLIMIN**  
**PADA MASA HUSNI MUBARAK**

Pada Bab ini akan diuraikan sekilas tentang Husni Mubarak, kebijakan-kebijakan yang diambilnya baik secara umum maupun yang khusus terhadap IM, lalu terakhir bagaimana IM merespon kebijakan tersebut.

Berbeda dengan Nasser, Mubarak lebih memilih strategi akomodasi untuk membendung kekuatan dan pengaruh IM. Walaupun begitu, penekanan demi penekanan tetap dilakukan Mubarak untuk menahan penyebar luasan pengaruh IM. IM menghadapi kebijakan tersebut tentunya berbeda dengan merespon kebijakan Nasser. Terdapat strategi-strategi khusus yang dilakukan sebagai upaya merespon kebijakan Mubarak, agar tetap dapat mempertahankan eksistensinya.

**A. Kebijakan Husni Mubarak**

Husni Mubarak adalah salah satu presiden terlama yang pernah menjabat di kawasan Timur Tengah. Gaya memimpinya yang diktator mampu membungkam semua lawan-lawan politiknya.

Di bawah kepemimpinannya, Mesir menjadi kawan dekat Amerika Serikat, jauh berbeda dengan masa Gamal Abdul Nasser yang berusaha untuk tidak berkompromi dengan negara adidaya tersebut. Beberapa kebijakannya

menuai pro dan kontra di kalangan rakyatnya, seperti kebijakannya yang sangat pro terhadap militer menjadikan militer sebagai anak emas.

### **1. Sekilas Tentang Husni Mubarak**

Husni Mubarak memiliki nama lengkap Hosni Sayyid Mubarak, lahir pada 4 Mei 1928 di Kafr el Me Selha, Governorat al Munufiyah, Mesir. Ia menjalani Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas di Shabin El Koum. Ia bergabung dengan Akademi Militer Mesir ketika masih duduk dibangku sekolah menengah. Pada tahun 1949, ia berhasil menamatkan pendidikannya sehingga ia mendapatkan gelar sarjana di bidang ilmu militer.

Pada tahun 1949, Husni Mubarak bergabung dengan Akademi Angkatan Udara Mesir dan menjadi pilot pada 13 Maret 1950. Ia pun berhasil mendapatkan gelar sarjana muda di bidang ilmu penerbangan. Ia juga sempat mengikuti pelatihan pesawat jet pengebom Ilyushin Il-28 dan Tupolev Tu-16, dan pada tahun 1964 ia menempuh pendidikan kembali di Frunze Military Academy.<sup>1</sup>

Karir militernya di Mesir diawali dengan diangkatnya ia menjadi Komandan Pangkalan Udara Kairo Barat pada Oktober 1966. Pada November 1967, ia kembali mendapatkan jabatan sebagai Komandan Akademi Angkatan Udara Mesir serta Deputi Menteri Pertahanan Mesir pada tahun 1972. Akibat dari kontribusi besar yang diberikannya pada Perang Oktober melawan Israel, Mubarak diangkat menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Udara Mesir.

---

<sup>1</sup> Hamid Bahari, *Bara Diktator Dunia yang Berhasil Dinuklir*. (Yogyakarta: Elexbooks

Pada tahun 1975, Husni Mubarak diangkat menjadi wakil presiden. Pada bulan Oktober 1980, saat Husni Mubarak dengan presiden Mesir, Anwar Sadat, beserta sejumlah diplomat asing menyaksikan upacara parade peringatan kemenangan pasukan Mesir atas Israel di Terusan Suez. Pada saat itu, dua granat meledak diikuti dengan pemberondongan peluru senapan serbu ke segala arah. Anwar Sadat meninggal pada masa kejadian tersebut. Pembunuhnya adalah Letnan Khalid Islambouli, pemimpin sebuah gerakan jihad, yang disebut-sebut sebagai anggota IM.

Husni Mubarak diangkat menjadi presiden Mesir pada tanggal 14 Oktober 1981 dan menjabat sebagai Ketua Partai Demokrasi Nasional (National Democratic Party/NDP).

## **2. Gaya Kepemimpinan Pada Kebijakan Mubarak**

Husni Mubarak adalah presiden Mesir keempat, menjabat dari 1981-2011 hampir 30 tahun lamanya. Pertama kali ia menjadi presiden dipilih bukan karena pemilu tetapi hanya menggantikan Anwar Sadat sang presiden yang terbunuh.

Setelahnya, ia dipilih menjadi ketua NDP, hal itu tentu memberikannya kekuasaan penuh atas pemerintahan. Terbunuhnya Anwar Sadat membuatnya harus ekstra berhati-hati dan fokus dalam mengelola keamanan. Sehingga, diawal kerjanya sebagai presiden ia memproklamasikan Mehabith Aman Ad Daula. Dengan

Investigasi Keamanan Negara Mesir dan Badan Keamanan Pusat, badan anti huru-hara.<sup>2</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, Mubarak menerapkan kepemimpinan diktator militer. Hanya saja, ketika Nasser berkuasa Mesir lebih condong ke kaum sosialis Sovyet, sedangkan di masa Mubarak, Mesir lebih condong ke Amerika Serikat. Ini terlihat dari keterlibatan Mesir dalam perang Teluk 1990.

#### **a. Menjadi Sekutu Amerika di Perang Teluk**

Perang Teluk disebabkan atas invasi Irak ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. Perang ini disebabkan karena pelanggaran kuota minyak oleh Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab yang menyebabkan harga minyak anjlok. Anjloknya harga minyak ini berdampak buruk bagi perekonomian Irak yang memang sangat mengandalkan pendapatan negaranya dari minyak. Ulah Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab inilah yang menyulut kemarahan Irak, ditambah lagi dugaan Irak atas Kuwait yang mencuri minyak di perbatasan Rumelia, Irak.

Perang pun tidak terhindarkan, Arab Saudi meminta bantuan Amerika Serikat pada 7 Agustus 1990. Kemudian disusul oleh negara-negara Arab termasuk Mesir. Mesir menjadi pasukan sekutu yang berada dipihak Amerika Serikat dan bergabung dalam Perang Teluk pada tahun 1991.

---

<sup>2</sup>Hosni Mubarak, (diakses pada 28 Oktober 2013); dari <http://profil.merdeka.com/mancanegara/h/hosni-mubarak/>

Semenjak Perang Teluk, Mesir menjadi sekutu dekat Amerika yang dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Keterlibatan Mesir dalam Perang Teluk memperkuat posisi Mesir di Timur Tengah, dan menambah popularitas Mubarak sebagai pemimpin Mesir ketika itu.

Hubungan baik antara Mesir dan Amerika disambut positif oleh Israel yang juga telah melakukan hal yang sama dengan Mesir. Pemerintahan Mubarak telah mendapatkan bantuan setiap tahun sekitar 1,5 juta US dollar dari Amerika Serikat guna melestarikan perjanjian Israel-Mesir.<sup>3</sup>

Pada tahun 2000, Mesir yang diwakili Mubarak terlibat dalam perundingan damai di Timur Tengah dengan Bill Clinton, di Kairo. Tidak hanya itu bersama AS, Mesir pun turut memerangi terorisme. Gencarnya Mesir dalam memerangi terorisme setelah tuduhan sebagai negara sarang teroris dialamatkan kepadanya. Karenanya rezim Mubarak ikut aktif membantu CIA dalam memerangi gerakan Islam fundamentalis di negaranya.<sup>4</sup>

Pada tahun 2007, sebagai bukti kedekatan pemimpin Mesir dengan AS, Mubarak tanpa beban menutup perbatasan Mesir-Palestina. Akibatnya rakyat Palestina terisolasi, tidak ada bantuan yang masuk ke negara tersebut selama berperang dengan Israel. Mubarak membiarkan rakyat Palestina kelaparan dan tanpa obat-obatan, padahal rakyat Mesir telah beramai-ramai mengutuk tindakan pemimpinnya tersebut.

---

<sup>3</sup> \_\_\_\_\_, (diakses pada 28 Oktober 2013); dari [http://indonesian.irib.ir/en/afrika//asset\\_publisher/fgT0/content/id/5117532/pop\\_up?\\_101\\_INSTANCE\\_fgT0\\_viewMode=print](http://indonesian.irib.ir/en/afrika//asset_publisher/fgT0/content/id/5117532/pop_up?_101_INSTANCE_fgT0_viewMode=print)

<sup>4</sup> *Krisis Mesir dan Sikap Hipokrit Amerika*, (diakses pada 28 Oktober 2013); dari <http://mediaumat.com/mancanegara/2660-52-krisis-mesir-dan-sikap-hipokrit-amerika-a.html>

Dalam bidang ekonomi, kebijakan Mubarak yang cenderung condong ke Amerika Serikat ini melahirkan sistem ekonomi liberal. Dimana pada masa Mubarak inilah hotel-hotel megah mulai dibangun, perusahaan-perusahaan asing mulai berdiri, Mesir juga mulai menerima bantuan luar negeri berupa investasi, salah satunya Mesir masuk dalam daftar tiga penerima bantuan dana terbesar dari AS.

Pada tahun 1991, Mubarak mulai memberlakukan liberalisasi perbankan, dengan adanya sistem tersebut Mesir mampu memiliki cadangan devisa sekitar 18 milyar US dollar, angka inflasi pun turun dibawah 10 %.

Masalah yang dihadapi Mubarak pada waktu itu adalah masalah pengangguran yang mencapai angka 17 % dari total jumlah penduduk Mesir, dan 80 % dari mereka adalah angkatan kerja muda yang sebagian besar lulusan perguruan tinggi. Hal ini diperparah dengan kenaikan harga-harga barang dan pengurangan subsidi, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Kondisi ini terus berlangsung, ditambah dengan kasus korupsi yang marak dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang malah terkesan disembunyikan oleh Mubarak.<sup>5</sup>

#### **b. Kebijakan Mubarak terhadap Militer**

Pada tahun 1939 dibentuklah organisasi rahasia pertama yakni organisasi perwira bebas yang beranggotakan perwira angkatan bersenjata Mesir. Tokoh-

---

<sup>5</sup> Rizfa Amalia, *Kebijakan-kebijakan Hosni Mubarak di Mesir (1981-2011)*. (skripsi, Universitas Indonesia, 2012), hal. 63 dikutip dari "Dilema Hosni Mubarak" *Republika*, 5 Februari 2011, hlm. 2

tokoh dalam organisasi tersebut antara lain Anwar Sadat, Abdel Munem Abdul Rauf, Hassan Ibrahim, Ahmed Saudi Husein, dan Hassan Izzat. Pada Revolusi 1952 organisasi inilah yang menginisiasinya untuk menggulingkan pemerintahan Raja Farouk.

Militer Mesir merupakan yang terbesar di Afrika dan Timur Tengah.<sup>6</sup> Salah satu yang membuatnya terkuat karena Mesir memiliki Angkatan Udara yang memiliki berbagai alusista yang lengkap. Salah satunya terdapat 216 pesawat F-16 yang membuatnya menempati urutan keempat operator terbesar di dunia. Angkatan Udara Mesir (Egyptian Air Force/EAF) juga memiliki sekitar 579 pesawat tempur dan 149 helikopter bersenjata yang memiliki 35 Apache AH-64D. Militer Mesir yang kuat ini didukung oleh bantuan dari Amerika setiap tahunnya.<sup>7</sup> Pada tahun 2009, Amerika memberikan bantuan sekitar 1,3 milyar US Dollar untuk menambah alusista bagi Militer Mesir.<sup>8</sup>

Militer Mesir menempati posisi yang nyaman, mereka tidak lagi diminta untuk bertempur memegang senjata. Akibat perjanjian Camp David, Mesir telah menjalin hubungan baik dengan negara yang pernah menjadi musuhnya, yakni Israel. Militer tidak lagi memiliki musuh kecuali orang-orang di dalam negerinya yang dianggap membahayakan seperti kelompok fundamentalis Islam. Organisasi HAM Mesir pernah mencatat bahwa militer Mubarak telah menahan sekitar 4000

---

<sup>6</sup>Egyptian Armed Forces, (diakses pada 28 Oktober 2013); dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian\\_Armed\\_Forces](http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_Armed_Forces)

orang (1000 diantaranya adalah anggota IM) tanpa proses pengadilan ditahan dan disiksa dengan kejam.<sup>9</sup>

Militer di Mesir berbeda dengan militer di negara lain, di Mesir militer juga terjun dalam ranah ekonomi dan politik. Berdasarkan UU Darurat Militer yang dibuat pada tahun 1981, Militer diberikan kekuasaan untuk mengendalikan seluruh aktivitas di Mesir. Karenanya militer Mesir juga terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti ikut mengelola industri mobil Hyundai dan menghasilkan berbagai barang seperti sup kaleng, air kemasan, minyak dan produksi gas alam.

Uniknya, Militer justru tersebar di ranah ekonomi dan politik. Mereka yang ingin mendirikan usaha tidak dikenakan pajak. Namun, kondisi ini hanya dialami militer berpangkat tinggi dan tidak berlaku untuk yang berpangkat rendah.<sup>10</sup>

Loyalitas Mubarak terhadap militer juga terlihat saat ia menjadi pemimpin, beberapa jabatan menteri diduduki oleh militer. Pada saat terjadi peristiwa Luxor 1997 yang menewaskan ratusan warga asing dan warga sipil, Mubarak memecat menteri dalam negerinya, Al Alfi, kemudian mengangkat militer sebagai penggantinya.

---

<sup>9</sup> Hosni Mubarak Dulu dan Hari Ini, (diakses pada 28 Oktober 2013); dari <http://sosok.kompasiana.com/2011/01/31/hosni-mubarak-dulu-dan-hari-ini-338622.html>

<sup>10</sup> Rizfa Amalia, *Kebijakan-kebijakan Hosni Mubarak di Mesir (1981-2011)*, op. cit., hal 28

## **B. Kebijakan Mubarak terhadap Ikhwanul Muslimin**

Seperti yang dilakukan para pendahulunya, Mubarak juga berusaha memberikan tekanan terhadap IM. Mubarak ikut membantu AS dalam memerangi terorisme dengan melakukan tindakan represif terhadap kelompok radikal sebagai konsekuensi hubungan Mubarak dan Amerika Serikat. Seseorang atau kelompok yang dianggap teroris oleh mereka adalah kelompok Islam radikal yang menurut mereka dapat mengancam pemerintahan. Mubarak menerapkan kebijakan itu kepada IM dan menggunakan kekuasaannya untuk menangkap orang-orang yang dianggap mengancam kekuasaannya, bahkan 1000 anggota IM ditangkap tanpa diadili, dan mereka disiksa dengan kejam.<sup>11</sup>

### **1. Kebebasan IM dalam Partisipasi Politik**

IM telah bertransformasi menjadi gerakan yang lebih moderat sehingga, Mubarak hanya menunggu momentum untuk menekan IM saat IM benar-benar menggunakan langkah-langkah memerangi pemerintahan.

Mubarak memberikan keleluasaan pada IM untuk bergerak, hal ini dimaksudkan karena IM telah berubah menjadi organisasi moderat dan diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintahnya. Sehingga, pemerintahannya yang diktator tidak diganggu oleh IM. Mubarak juga

---

<sup>11</sup> Hosni Mubarak Dulu dan Hari Ini, (diakses pada 28 Oktober 2013); dari <http://sosok.kompasiana.com/2011/01/31/hosni-mubarak-dulu-dan-hari-ini-338622.html>

memberikan kelonggaran bagi IM untuk ikut dalam percaturan politik Mesir, walaupun tidak dengan partai mereka sendiri harus koalisi dengan partai lain.<sup>12</sup>

Mubarak selalu berjanji untuk memberikan kebebasan (demokrasi) bagi warganya termasuk kepada IM selaku musuh bebuyutan pemerintahan Mesir selama bertahun-tahun itu. Ia bahkan membuat kebijakan-kebijakannya lebih Islamis, hal ini terlihat dari diperbolehkannya wanita bercadar dan laki-laki berjanggut tebal lalu lalang di jalanan-jalanan Mesir. Mubarak juga memberikan kebebasan bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah. Mubarak pun memperbolehkan IM ikut dalam pemilu di *Majlis Al Shaab* (Majelis Rakyat, Majelis Rendah Parlemen). Namun, tanpa diduga kebijakan Mubarak ini semakin membuat IM berkembang dan memiliki masa yang cukup banyak. Sehingga, dibalik pernyataan dukungannya terhadap IM, Mubarak tetap menggunakan cara-cara yang tidak demokratis terhadapnya, misalnya dengan melakukan penangkapan terhadap anggota IM setiap akan diadakan pemilu.<sup>13</sup>

## **2. Penekanan terhadap Ikhwanul Muslimin**

Mubarak memberikan porsi bagi anggota IM untuk terlibat di parlemen tanpa menggunakan simbolisasinya. Walaupun begitu, kerenggangan hubungan antara Husni Mubarak dengan IM sangat terlihat. Pasca pembunuhan Anwar Sadat oleh Jamaah Islamiyah yang diduga merupakan penjelmaan dari IM, Mubarak dibayangi perasaan bahwa IM akan melakukan hal sama terhadapnya.

---

<sup>12</sup> Rizfa Amalia, *Kebijakan-kebijakan Hosni Mubarak di Mesir (1981-2011)*, op. cit., hal 23

<sup>13</sup> Adhe Nuansa Wibisono, *Perjuangan Politik Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam Melawan Rezim*

Terlebih Jamaah Islamiyah atau al Jihad ini merupakan kelompok berani mati yang memiliki visi jihad sebagai pilar Islam yang keenam dan perjuangan bersenjata merupakan kewajiban muslim sejati untuk membersihkan diri dari kebobrokan.<sup>14</sup> Hal ini yang membuat Mubarak sangat berhati-hati dengan adanya kebebasan bagi IM.

Pada sebuah kasus, pasangan Yahudi-Israel yang menjadi turis di Mesir kedatangan dengan sengaja menyuntikkan virus AIDS ke anak-anak di wilayah kumuh di Kairo. Kejadian ini memunculkan kemarahan yang luar biasa dari IM. Kemarahan IM setidaknya mampu membuat industri pariwisata Mesir porakporanda dan negara mengalami kerugian 700 juta US Dollar.<sup>15</sup>

Adanya dukungan Clinton terhadap Mubarak dalam memerangi "kaum religious ekstrimis" dan terorisme, semakin memperkuat kebijakan Mubarak dalam menekan IM.<sup>16</sup> Pada tahun 1994, sebagian penasehat Clinton menyatakan pujian terhadap Mesir yang telah mampu membentuk Negara yang demokratis dengan memerangi terorisme. Sebenarnya pernyataan ini menunjukkan kegelisahan Washington terhadap perkembangan politik di Mesir.<sup>17</sup> Amerika pun terlihat tidak serius ketika ditanya mengenai kasus pelanggaran HAM di Mesir dan bungkam ketika ditanya kasus pembubaran IM serta penyerangan asosiasi-

---

<sup>14</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Demologi Islam; Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal 64

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 65

<sup>16</sup> Fawaz A. Gergez, *Amerika dan Islam Politik, Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan?* (New York: Cambridge University Press, 1999) hal 230

asosiasi profesional oleh Mubarak. Amerika mengklaim bahwa hal itu merupakan urusan dalam negeri Mesir yang tidak dapat dicampuri olehnya.<sup>18</sup>

Mubarak menyebut IM sebagai kaum ekstrimis yang akan mengacaukan negaranya, Mesir. Puncaknya pada tahun 1992, Mubarak melawan IM dengan mengkampanyekan anti gerakan teroris dan kaum fundamentalis Islam. Sejumlah pemimpin kelompok Islam radikal ditangkap dan diadili. Masjid-masjid yang disinyalir sebagai basis kelompok Islam radikal diawasi dan juga diadakan operasi militer terhadap markas-markas kelompok ini.

Pada tahun 1993, asosiasi profesional ditekan dan seluruh aktivitasnya di bawah kontrol pemerintah. IM dicap sebagai gerakan teroris. Mubarak mengadakan propaganda melalui media massa nasional. Seluruh media massa Mesir diminta untuk memuat pencitraan negativ terhadap IM. Beberapa kadernya ditahan dengan tuduhan terlibat dalam organisasi ilegal yang akan menggulingkan pemerintahan.

Pada bulan Juni 1995, saat mengikuti konferensi Organization of African Unity di Etiopia, Husni Mubarak mengalami percobaan pembunuhan yang dilakukan Egyptian Islamic Jihad. Namun, ia berhasil selamat dari kejadian tersebut. Setelah ia kembali ke Mesir, Mubarak memerintahkan pengeboman terhadap Jama'ah Islamiyah dan menewaskan sekitar 20.000 orang yang terlibat

dalam Organisasi Revolusi Islam.<sup>19</sup> Tidak hanya itu, pada tahun 1998, ratusan aktivis mahasiswa Islam ditahan menjelang pemilu mahasiswa.

### C. Strategi *Layering* dan Advokasi Ikhwanul Muslimin

IM menjadi *underground movement* setelah Naseer melarang organisasi tersebut. Namun, pada masa Anwar Sadat, IM diberikan kelonggaran untuk bergerak dengan menjadi organisasi legal, walaupun tidak diperbolehkan untuk terjun dalam ranah politik.

IM benar-benar mengambil kesempatan tersebut untuk bergerak mengembangkan sayap organisasinya. Masa Sadat dijadikannya momentum untuk pengkaderan. IM memperkuat bidang pengkaderannya dengan mengadakan pengajian di masjid-masjid sebagai sarana untuk menanamkan ideologi Islam dan melalui asosiasi mahasiswa Islam.

Melalui masjid IM dapat memobilisasi masa untuk berdakwah secara legal karena salah satu fungsi masjid adalah sebagai salah satu tempat untuk syiar Islam. Masjid adalah tempat yang efektif untuk merekrut anggota melalui pendekatan-pendekatan keislaman dan perekrutan kedua sangat difokuskan pada wilayah mahasiswa.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hamid Bahari, *Para Diktator Dunia yang Berhasil Digulingkan*, op. cit., hal 154

<sup>20</sup> Adhe Nuansa Wibisono, *Perjuangan Politik Al-Ikhwān Al-Muslimin dalam Melawan Rezim Otokratik di Mesir Pada Era جمال عبدالناصر sampai Hosni Mubarak (1954-2011)*, op.

Pada ranah mahasiswa ini, organisasi yang bernama Jamaah Islamiyah didirikan oleh aktivis IM. Organisasi ini merupakan bentuk kedua dari IM di wilayah kampus. Cabang IM di universitas diketuai oleh satu pimpinan, kemudian dalam tingkatan yang lebih khusus yakni di fakultas-fakultas masing-masing memiliki satu pimpinan. Dalam geraknya organisasi ini fokus pada aksi yang diwujudkan dalam bentuk program, seperti pelatihan-pelatihan, aksi sosial masyarakat, serta memberikan bantuan finansial kepada mahasiswa kurang mampu. Sehingga, Organisasi IM pada masa Anwar Sadat dapat berkembang dengan baik. Terakhir, hubungan antara Anwar Sadat dan IM retak karena perjanjian Camp David tahun 1979 yang ditandatangani oleh Sadat sebagai bentuk dari dibukanya hubungan baik antara Israel-Mesir yang membuat kemarahan IM.

IM mendapatkan simpati publik secara luas. Tekanan yang dihadapinya dan caranya meresponnya yang tenang membuat publik simpati terhadapnya, sehingga organisasi ini mampu menghimpun masa secara luas. Pada masa Mubarak, IM menggunakan strategi *layering* dan advokasi. Strategi *critical engagement* tidak pernah dilakukan oleh IM karena IM tidak pernah terlibat kerjasama dengan pemerintahan Mesir. Penulis membahas strategi *layering* IM dalam bentuk penguasaan asosiasi profesional dan strategi advokasi, ketika IM menjadi gerakan reformis-agamis. Penguasaan asosiasi profesional merupakan penerapan strategi *layering*, hal ini dapat diketahui ketika IM menguasai organisasi-organisasi strategis tanpa menggunakan simbolisasinya (pelapisan).

Sedangkan strategi advokasi digunakan saat IM sudah mulai menggunakan

atribut-atribut keislaman dan simbol-simbol organisasi dalam geraknya, dan bagaimana pula IM terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

### **1. Penguasaan Asosiasi-asosiasi Profesional**

Setelah basis kekuatan dibangun pada masa Anwar Sadat, IM kemudian memilih memperluas partisipasi publik di masa Husni Mubarak. Ikhwan memilih untuk bergabung dengan asosiasi-asosiasi profesional, seperti asosiasi dokter, insinyur, pengacara, agronom, farmasi dan dokter gigi tahun 1948 melalui Islamic Trends. IM mengajukan kandidatnya untuk menjadi pemimpin dalam asosiasi Islamic Trends ini. Hal ini membuat terciptanya blok kekuatan baru diantara kelompok oposisi sekuler kiri dan liberal yang cenderung mendukung kandidat pro pemerintah.

Pada tahun 1984, dari 25 kursi Dewan Eksekutif Asosiasi Kesehatan, 7 kursi telah mampu diduduki oleh IM yang menjelma menjadi Islamic Trends. Dan pada tahun 1990, Islamic Trends mampu merebut 20 kursi dan hanya menyisakan 5 kursi untuk diperebutkan kelompok lain.<sup>21</sup>

Dalam kesempatan ini IM mampu menarik perhatian kaum menengah terdidik dengan program-programnya, seperti :<sup>22</sup>

1. Proses pennebarhan pengaruh yang langsung menentunh kalangan

2. Berupaya memunculkan model baru gaya kepemimpinan yang jauh dari apa yang elit pemerintah perlihatkan selama ini
3. Mengadakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran dan kalangan usia muda.

Islamic Trends berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap Negara. Asosiasi professional ini mampu membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, klinik, dan masjid yang berbasis Islam yang kental akan nilai-nilai keislaman. Sehingga dari sinilah IM membentuk komunitas sosial berbasis keislaman.

Pada tahun 1988, asosiasi professional ini mengadakan konferensi membahas masalah pengangguran para sarjana Insinyur lulusan Mesir. Tercatat lebih dari 20.000 orang insinyur tidak memiliki pekerjaan dan berdasarkan hasil survey 25.000 dokter yang tersebar di 12 provinsi di Mesir tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena gaji yang sangat minim diterima.<sup>23</sup> Dalam konferensi ini berusaha dibahas mengenai masalah yang terjadi dan bagaimana solusinya.

Pada tahun 1992, terjadi gempa di Mesir dimana asosiasi tenaga medis langsung terjun ke lapangan untuk membantu korban bencana alam tersebut. Mereka membangun membangun tenda-tenda pengungsian, mendistribusikan bahan makanan, alat medis, dan selimut kepada para korban bencana. Namun,

---

<sup>23</sup> Carrie Rosefsky Wickham, *Islamic Mobilization And Political Change : The Islamist Trend In Egypt's Professional Association*, *Political Islam : Essays From Middle East Report* (London: IP

tampaknya kegiatan ini tidak didukung pemerintah. Menteri Dalam Negeri Mesir, Muhammad Abdul Halim Musa, mengatakan tindakan dari Islamic Trends bagaikan negara di dalam Negara. Menurutnya, tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah tidak boleh dilakukan oleh rakyat biasa, sehingga karenanya kurang memberikan kesempatan pada pemerintah untuk bekerja.

IM kemudian merubah strateginya dengan melakukan penetrasi terhadap lembaga-lembaga resmi yang telah ada dan memulai geraknya secara terstruktur serta hati-hati.

Dari kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa IM mulai melakukan transformasi dalam geraknya. Melalui asosiasi profesional dan penetrasi beberapa lembaga pemerintah yang sudah ada serta menciptakan lembaga serupa, IM mampu bangkit kembali untuk melakukan perubahan mulai dari bawah (*bottom up*). IM tidak lagi menggunakan simbolisasinya untuk bergerak diranah publik. Dengan terjaganya simbolisasi tersebut, IM mampu bergerak cepat untuk masuk ke ranah yang lebih luas.

## **2. Turut Serta dalam Pemilu**

Pada masa ini IM mulai mencoba terjun keranah politik. Sepeninggal Hudhaibi pada tahun 1973, Mursyid Am digantikan oleh Umar Tilmisani. Dalam kepemimpinannya Tilmisani terlihat lebih moderat terhadap pemerintah. Ia menerima demokrasi parlementer dan pluralisme politik.<sup>24</sup> Sikap Tilmisani

---

<sup>24</sup> Nuansa Wibisono, Adhe, *Perjuangan Politik Al-Ikhwani Al-Muslimun dalam Melawan Rezim Otoritarianisme di Mesir Pada Era Gamal Abdul Nasser sampai Husni Mubarak (1954-2011)*, op

sebenarnya merupakan bentuk terjemahan dari kata-kata Huhaybi yang sangat terkenal yakni "tegakkan negara (*daulah*) Islam dalam hatimu, maka ia akan tegak di negerimu". Tilmisani mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan IM, tidak dengan menggunakan cara-cara yang sebagaimana pernah diilhami oleh murid-murid Sayid Qutbh yang lain.

Pada tahun 1984, IM mencoba untuk terjun ke dalam pemerintahan. Husni Mubarak tahu benar mengenai arah gerak IM ini, lantas ia membiarkan IM terjun ke pemerintahan dengan tujuan agar ketika IM diberika porsi kekuasaan, ia dapat mengontrol segala pernyataan yang dikeluarkan IM dan kelompok Islam moderat lainnya. Karena kekuatan massa yang cukup besar, tidak dipungkiri oleh Mubarak dapat menjadi ancaman serius bagi pemerintahannya.

IM dilarang untuk mendirikan partai politik, sehingga IM harus bekoalisi dengan partai oposisi yakni Partai Wafd. Partai Wafd adalah partai oposisi sekuler di Mesir. Dalam pemilihan umum, IM terlepas dari ciri-ciri internal gerakannya, struktur dan ideologinya. Hal ini menunjukkan bahwa IM dan partai lainnya dapat berpartisipasi dalam politik sesuai dengan prosedur demokrasi yang ada.<sup>25</sup> Orang yang berjasa dalam mempertemukan antara IM dengan Partai Wafd adalah Muhammad Abd Al-Quddus, anggota dewan Pers dan tokoh IM. Partai Wafd sendiri menganggap tawaran dari IM adalah kesempatan, dimana Wafd dapat kembali ke panggung politik setelah absennya mereka selama beberapa tahun.

---

<sup>25</sup> Mahadi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik, Analisa Pemikiran Sayyid Qutb*, (Solo: Ramadhani, 1991), hal 20

Dengan bergabungnya IM akan ada basis kekuatan masa yang besar untuk menyokongnya.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa peraturan dalam pemilu kali ini dimana beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan baru, yakni:<sup>27</sup>

1. Pemilihan umum bersifat representasi proporsional menggantikan sistem calon tunggal
2. Setiap bakal calon merupakan representasi dari satu partai
3. Ambang batas (*threshold*) adalah 8 % dari total pemilih nasional
4. Suara untuk partai oposisi yang kurang dari 8 % akan ditransver kepada partai pemerintah, National Democratic Party (NDP).

Peraturan tersebut termuat dalam UU Pemilihan Umum 114/1983, yang diusulkan oleh parlemen.

Dalam pemilu tersebut, koalisi antara IM dan Wafd adalah satu-satunya yang lolos *threshold* dengan mendapatkan 15,1 % dari total suara nasional. Dari 448 kursi Partai Wafd mendapatkan 58 kursi yang 8 diantaranya kemudian diisi oleh Ikhwan.<sup>28</sup> Dari sinilah IM mulai membentuk kekuatan barunya diparlemen dengan masa kepengurusan 1984-1987.

Dalam pemilu selanjutnya, terdapat beberapa perubahan dalam peraturan pemilu. Pada pemilu 1987 untuk partai yang memiliki suara di bawah 8 %, secara otomatis suaranya akan ditransver kepada partai mayoritas.

---

<sup>26</sup> Ibid., hal 9-10

<sup>27</sup> Loc. cit

<sup>28</sup> Loc. cit

Melihat aturan baru tersebut, IM segera menyusun strategi untuk mendulang suara mayoritas. Ibrahim Shukri, ketua umum Partai Buruh kemudian mendatangi Mursyid Am keempat, yang saat itu masih baru dibai'at, yakni Muhammad Hainid Abu Al-Nasr, untuk menawarkan koalisi. Begitupun partai Al Ahrar, yang tahun 1984 mendapatkan suara di bawah ambang batas, tidak ingin mengulang kekalahannya di masa lalu, sehingga menawarkan koalisi dengan IM.

Koalisi antara IM, Partai Al Ahrar, dan Partai Buruh, dikenal dengan "Aliansi Islam" (*Al-Tahaluf Al-Islam*). Dalam kesempatan ini, IM mendominasi dalam hal propaganda dan promosi.

Namun, beberapa hari sebelum pemilu, beberapa anggota IM ditahan. Rezim Mubarak dengan leluasa mengatur jalannya pemilu. Mereka mengintervensi dengan melakukan tekanan-tekanan dari mulai pemilu sampai sesudah pemilu. Mereka juga yang menyebabkan hilangnya hak suara bagi pemilih yang akan memilih pihak oposisi. Bagi beberapa tempat yang diketahui sebagai basis oposisi, surat suara pasti bermasalah, dan akan didapatkan 80 % suara untuk partai NDP (partai pemerintah).<sup>29</sup>

Hasilnya, koalisi antara IM dan Partai Buruh mendapatkan 17 % suara, dengan jatah 36 kursi bagi IM. Sedangkan Partai Wafd sendiri hanya 35 kursi. Kemunculan IM di parlemen sebagai pemimpin oposisi terbesar membuat IM dijadikan acuan baru. Inilah kali pertama sebuah organisasi yang pernah

menjadi organisasi terlarang menempatkan lebih dari sepuluh kadernya di Parlemen.<sup>30</sup>

### **3. Ikhwanul Muslimin sebagai Gerakan Reformis dan Agamis**

Kebijakan Mubarak terkait dengan keinginannya menjadikan Mesir lebih demokratis tertuang dalam konstitusi Mesir Artikel 46.<sup>31</sup> Di dalamnya tercantum penjaminan negara atas kebebasan beragama. Hal ini, tentunya terasa berkebalikan bagi IM yang secara terang-terangan sebagai organisasi agama mendapatkan penekanan dari pemerintahan Mubarak.

Dalam statmennya, Mubarak berniat untuk menjadikan Mesir lebih Islami, namun, Mesir cenderung lebih bisa dikatakan sebagai negara Sekuler dibandingkan dengan Negara agama. Kondisi disekitar Universitas Al Ahzar bisa dijadikan contoh. Ketika adzan berkumandang, lantas pertokoan Khan Khalili yang terkenal sangat ramai berada di sekitar Al ahzar, tidak langsung menutup atau menghentikan kegiatannya dan melaksanakan shalat. Kegiatan perdagangan tetap dilanjutkan, yang sedang menonton tv pun tidak tergerak untuk segera melaksanakan shalat.<sup>32</sup> Hal ini sangat ironi mengingat Al Ahzar adalah ibu dari universitas Islam di seluruh dunia.

Ketidakbebasan juga dirasakan Kristen Koptik yang dipersulit ketika akan membuat KTP dan segala bentuk administrasi kenegaraan.<sup>33</sup> Keadaan ini yang membuat IM sangat prihatin. IM mulai merealisasikan nilai-nilai Islam dengan

---

<sup>30</sup> Ibid., hal 13

<sup>31</sup> Rizka Amelia, *Kebijakan kebijakan Hosni Mubarak di Mesir (1981-2011)*, op. cit. hal 62

tulus dan jujur. Pemahaman Islam secara komprehensif membuat IM dekat pula dengan orang-orang selain umat muslim. Seperti yang tertulis dalam buku Abbas As Siisiy, bagaimana Ustman Bin Affan mengajarkan cara memperlakukan orang-orang di luar umat muslim.<sup>34</sup>

IM mulai mempromosikan dakwah Islamnya dengan memunculkan sarana yang menghibur, contohnya adalah nasyid. Melalui nasyid, dakwah Islam mulai bisa diterima dengan menarik hati dan menyentuh perasaan.<sup>35</sup> Nasyid mulai diperkenalkan sebagai acara hiburan di pernikahan-pernikahan masyarakat Mesir. Dan mulai meluas sehingga banyak dinikmati masyarakat Mesir secara luas.

Penekanan IM oleh Mubarak ditujukan dalam rangka untuk menahan pengaruh IM yang sebenarnya merupakan ancaman bagi Mubarak sendiri. Segala upaya digunakan untuk menahan laju gerak IM, yang hanya dalam waktu singkat dapat menjadi oposisi terbesar pemerintahan Mubarak.

Tekanan-tekanan yang dilayangkan Mubarak cukup membuat internal IM goyang.<sup>36</sup> Terjadi perselisihan antara biro pimpinan dan kalangan muda yang setuju akan koalisi dengan partai politik lain. Hal ini terkait dengan adanya isu legalisasi IM sebagai organisasi yang lebih inklusif dan moderat.

Tekanan terhadap IM terus digulirkan. Pada tahun 2000 saat IM mengikuti pemilu, sesaat setelah beberapa anggota IM berkampanye, mereka beramai-ramai

---

<sup>34</sup> Abbas As Siisiy, *Bagaimana Menyentuh Hati, Kiat-kiat Memikat Objek Dakwah*, op. cit., hal 266

<sup>35</sup> Ibid., hal 193

<sup>36</sup> Adhe Nuansa Wibisono. *Perjuangan Al Ikhwan Al Muslimun Melawan Rezim Otoritarianisme*

ditangkap. Setidaknya ada 550 Ikhwan termasuk 20 diantaranya adalah elit pimpinan IM.<sup>37</sup> Tentu saja pemilu ini jauh dari kesan demokratis, karena kredibilitas pemilu tercoreng oleh tindakan penguasa yang semena-mena.

Karenanya, IM hanya dapat mengajukan setengah dari jumlah calon yang pernah diajukannya pada tahun 1995, yakni 76 orang calon independen. Hasilnya, IM hanya memperoleh 17 kursi dari total 454 kursi anggota legislatif. Koalisi partai oposisi lain memiliki nasib sama, tidak jauh lebih baik, hanya 17 kursi yang berhasil direbut dari suara gabungan. Sedangkan, sudah dapat dipastikan partai berkuasa memperoleh mayoritas suara sekitar 87,7 % dari total suara. Keadaan ini semakin memperkuat dominasi Husni Mubarak di parlemen.<sup>38</sup>

Selama 14 tahun lebih Mubarak berada di tampuk kekuasaan dengan menjadi presiden Mesir. Hingga pemilu 1999, tercatat sudah 5 kali ia terpilih menjadi presiden Mesir.<sup>39</sup> Hal ini tentu menyulut tuntutan rakyat agar Mesir membentuk pemerintahan yang demokratis dan segera melakukan reformasi. Beberapa sisi gelap rezim ini perlahan terkuak, diantaranya adalah kasus korupsi yang banyak menjerat para pejabat Negara. Kasus korupsi terbesar ada pada tubuh Kementrian Dalam Negeri Mesir.<sup>40</sup> Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kekuasaan institusional yang merupakan upaya untuk melindungi posisi Mubarak sebagai presiden.

---

<sup>37</sup> Ibid., hal 16

<sup>38</sup> *Ikhwanul Muslimin: Sejarah Panjang Gerakan dan Pemerintahan yang Singkat*, (diakses pada 29 Oktober 2013); dari [http://satuharapan.com/index.php?id=109&tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=4068&cHash=1](http://satuharapan.com/index.php?id=109&tx_ttnews[tt_news]=4068&cHash=1)

<sup>39</sup> Hamid Bahari, *Para Diktator Dunia yang Berhasil Digulingkan*, op. cit., hal 155

<sup>40</sup> *Mesir Tangkap 3 Mantan Menteri Rezim Mubarak Atas Tuduhan Korupsi*, (diakses pada 28 Oktober 2013); dari <http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/mesir-tangkap-3-mantan-menteri-rezim-mubarak-atas-tuduhan-korupsi.htm#11n5okCd1QZO>

Pada pemilu 2005, Mubarak membuat regulasi baru untuk membuat kesan bahwa pemilu 2005 lebih demokratis. Ia melakukan amandemen Konstitusi Pasal 76 dimana untuk pertama kalinya Mesir melakukan pemilihan umum secara langsung.<sup>41</sup> Dalam pemilihan ini terdapat beberapa kandidat calon presiden, karenanya memaksa Mubarak untuk ikut dalam kampanye presiden. Dalam kampanyenya Mubarak memberikan janji-janji untuk perubahan Mesir, yakni dengan meningkatkan peran lembaga peradilan dan legislatif, serta apa yang telah ia lakukan yakni reformasi konstitusional.

Namun, pada kenyataannya, pemilu yang digelar 7 September 2005 itu mulai dipertanyakan keabsahannya. Pemilu mengharuskan calon presiden memperoleh 65 suara dari 444 kursi di parlemen. Hal ini tampaknya mustahil mengingat pada waktu itu 90 % kursi dikuasai partai berkuasa, NDP. Selain itu Mubarak diketahui menggerakkan orang-orangnya untuk mengintimidasi rakyat agar memilihnya.<sup>42</sup> Salah seorang calon yang kalah, Ayman Nour menolak hasil pemilu dan menuntut dilakukannya pemilihan ulang. Namun, usaha itu gagal justru malah ia dituduh melakukan pemalsuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.<sup>43</sup>

Meskipun dalam tekanan, IM tetap ambil bagian dalam pemilu 2005. Untuk kesekian kalinya, beberapa bulan sebelum pemilu anggota IM ditangkap. Kali ini sekitar 700 orang Ikhwan pada bulan Mei ditangkap dengan tuduhan ikut

---

<sup>41</sup> Esra Avsar, *The Transformation Of The Political Ideologi And The Democracy Discourse Of The Muslim Brotherhood In Egypt*, (Middle East Studies, Middle East Technical University, 2008), hal 76

<sup>42</sup> Hamid Bahari, *Revisi Diktator Dunia yang Berhasil Diulangi*, op. cit. hal 155

terlibat dalam *Kifaya* atau Egyptian Movement for Change (Gerakan Mesir Untuk Perubahan).<sup>44</sup> Walau begitu, IM mampu mengajukan 150 calon pada pemilu tersebut. Dan hasilnya di luar dugaan, dan cukup membuat Mubarak terkejut, IM mampu memperoleh 88 kursi atau 20 % dari total suara. Sedangkan oposisi lain hanya memengakan 14 kursi di parlemen.

Pencapaian yang gemilang pada pemilu kali ini tidak terlepas pada keberhasilan IM dalam menggerakkan publik Mesir. Strategi politik IM ini tampak dengan ciri khas IM menggunakan simbolisasi-simbolisasi Islam dalam setiap aktivitasnya. Inilah yang mampu menarik simpati rakyat.

Selama pemerintahan Mubarak, menurut Pasal 55 dalam konstitusi Mesir, seorang presiden memiliki wewenang 63 % lebih kuat dibandingkan badan legislatif yang hanya 25 %. Ini yang membuat Mubarak berada di puncak otoritas. Ditambah lagi isi Pasal 77, memungkinkan presiden berkuasa seumur hidup, tidak diamandemen oleh Mubarak.<sup>45</sup> Untuk menghalau para penentangannya terutama dari kubu oposisi, Mubarak memiliki undang-undang darurat dimana undang-undang tersebut dapat membungkam kelompok oposisi dengan alasan keadaan darurat.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Esra Avsar, *The Transformation Of The Political Ideologi And The Democracy Discourse Of The Muslim Brotherhood In Egypt*, op. cit., hal 77

<sup>45</sup> Nasib Drama Mesir Setelah Jum'at Ini, (diakses pada 28 Oktober 2013); dari <http://internasional.kompas.com/read/2011/02/11/12350483/Nasib.Drama.Mesir.Setelah.Jumat.Ini>

<sup>46</sup> Dina Amalia, *Kebijakan Kebijakan Hosni Mubarak di Mesir (1981-2011)*, op. cit., hal 21

Menurut Middle East Watch dan Amnesty International, Mubarak telah melakukan pelanggaran HAM dengan menangkap ribuan orang tanpa diadili.<sup>47</sup> Undang-undang darurat menjadi senjata untuk melegalkan kekuasaannya, menutupi kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan.

Setelah bertahun-tahun merasakan kediktatoran rezim Mubarak dengan segala sisi gelapnya, IM menawarkan sisi lain sebuah kepemimpinan yang demokratis dan Islami. Di tengah hausnya masyarakat akan nilai-nilai Islam, ikhwan menjelma menjadi orang-orang yang dirasa dapat menyembuhkan dahaga tersebut.

Hasan Al Banna dalam risalahnya mengatakan bahwa dakwah Al Ikhwan Al Muslimun dakwah yang tenang, namun, lebih gemuruh dari tiupan angin topan. Dari sini diketahui bahwa dakwah IM adalah dakwah yang masiv namun tidak terdengar gaungnya. Sampai pada masa dimana mereka harus mencicipi manisnya perjuangan mereka.

---

<sup>47</sup> Fouad A. George, *Amerika dan Islam: Politik, Bantuan, Peradaban atau Bantuan*